

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS LAKA LANTAS YANG  
MENIMBULKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI POLRES SIDOARJO

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

Bayu Ari Kristianto  
**NPM : 0871010006**

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2012

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS LAKA LANTAS YANG  
MENIBULKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI POLRES SIDOARJO

Disusun Oleh :

Bayu Ari Kristianto  
NPM. 0871010006

Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing

Fauzul Aliwarman, SH. M.Hum  
NPT. 3 8202 07 0221

Mengetahui  
DEKAN

Haryo Sulistiyantoro, SH. MM  
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS LAKA LANTAS YANG  
MENIMBULKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI POLRES SIDOARJO

Oleh :

Bayu Ari Kristianto

0871010006

Telah dipertahankan dihadapkan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal 29 November 2012

Pembimbing Utama

Tim Penguji :

1.

Fauzul Aliwarman, SH. M.Hum  
NPT. 3 8202 07 0221

Sutrisno, SH. M.Hum  
NIP. 1960212 198803 1 001  
2.

Subani, SH.M.Si  
NIP. 19510504 198303 1 001

3.

Fauzul Aliwarman, SH. M.Hum  
NPT. 3 8202 07 0221

Mengetahui,  
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro. SH,MM  
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS LAKA LANTAS YANG  
MENIMBULKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI POLRES SIDOARJO

Oleh :

Bayu Ari Kristianto

0871010006

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi  
ilmu Hukum Fakultas Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional ” Veteran ” Jawa Timur  
Pada tanggal 29 November 2012

Pembimbing Utama

Tim Penguji :

1.

Fauzul Aliwarman, SH. M.Hum  
NPT. 3 8202 07 0221

Sutrisno, SH. M.Hum  
NIP. 1960212 198803 1 001  
2.

Subani, SH.M.Si  
NIP. 19510504 198303 1 001

3.

Fauzul Aliwarman, SH. M.Hum  
NPT. 3 8202 07 0221

Mengetahui,  
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro. SH,MM  
NIP. 19620625 199103 1 001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Ari Kristianto  
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya /14 November 1989  
NPM : 0871010006  
Konsentrasi : Pidana  
Alamat : Pumpungan Gang Masjid No 14. Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :  
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS LAKA LANTAS YANG  
MENIMBULKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI POLRES SIDOARJO”  
dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas  
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya saya  
sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan  
(plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya  
bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana  
Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa  
penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui  
Dosen Pembimbing

Surabaya, 29 November 2012  
Penulis

Fauzul Aliwarman, SH. M. Hum  
NPT. 3 8202 07 0221

Bayu Ari Kristianto  
NPM .0871010006

## KATA PENGANTAR

Puji syukur pertama-tama penulis panjatkan kehadiran tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang selalu menyertai penulis selama menuntut ilmu pengetahuan pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, khususnya dalam penyusunan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS LAKA LANTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI POLRES SIDOARJO” sebagai kelengkapan serta memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Disamping itu penyusun menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini adalah karena bantuan dan dukungan baik berupa moril dan materiil yang sangat berharga dari berbagai pihak dalam berhubungan langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro. SH. MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus selaku Dosen Wali.
2. Bapak Sutrisno, S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Subani. SH. M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang tulus ikhlas membantu terselesainya skripsi ini di tengah kesibukan beliau.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, SH. M. Hum. Yang telah ikhlas membantu membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan.

5. Bapak Letda EKA ANGRIANA Kanit Lakalantas POLRES Sidoarjo yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian serta memberikan banyak keterangan dan data dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen dan semua karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya yang telah membantu penyusun dalam memenuhi keperluan administrasi, akademik sehingga penyusun lancar.
7. Seluruh teman-temanku sealmamater Fakultas Hukum khususnya Angkatan 2008 atas segala bantuan yang diberikan.
8. Terima kasih kepada Agus Samsu dan Sukarni selaku orang tua saya yang tulus ikhlas membiayai pendidikan saya sampai terselesaikan di Perguruan Tinggi ini.
9. Terima kasih kepada Fitri Amalia yang selalu mendukung setiap waktu dalam penyusunan skripsi.

Penyusun menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna karena kemampuan dan pengetahuan yang menulis sangatlah terbatas, oleh sebab itu penyusun mengharapkan saran dan kritik tentang penulisan skripsi ini untuk dapat mencapai kesempurnaan.

Akhir kata penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun serta pembaca khususnya dalam kalangan perguruan tinggi dimana penyusun berkecimpung di dalamnya.

Surabaya, 29 November 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
ABSTRAKSI.....	ix
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Yang Hendak Dicapai Dalam Penelitian .....	8
1.5 Pertanggungjawaban Pidana .....	8
1.6 Pengertian Tindak Pidana .....	12
1.8 Kesengajaan Dan Kealpaan.....	14
1.8.1 Kesengajaan.....	14
1.8.2 Kealpaan.....	15
1.9 Unsur Kelalaian Yang Menimbulkan Kecelakaan .....	16
1.10 Faktor-Faktor Penyebab kecelakaan.....	18
1.10.1 Human Error (Kesalahan Pada Manusia Sendiri).....	19

1.10.2 Kendaraan.....	19
1.10.3 Lingkungan .....	19
1.11 Disiplin Berlalu Lintas.....	20
1.11.1 Disiplin Berlalu Lintas.....	20
1.11.2 Persyaratan pengemudi.....	22
1.11.3Pengertian kendaraan Bermotor.....	23
1.11.4 Jenis Kendaraan .....	24
1.12 kecelakaan Lalu Lintas .....	24
1.13 Pertanggungjawaban pengemudi.....	26
1.14 Metode Penelitian .....	29
1.15 Jenis Penelitian.....	30
1.16 Sumber Data .....	31
1.17 Metode Pengumpulan Data.....	32
1.18 Metode Analisis Data .....	34
1.19 Sitematika Penulisan .....	34
<b>BAB II FAKTOR-FAKTOR KELALAIAN PENGEMUDI YANG</b>	
<b>BISA DIPIDANA.....</b>	<b>38</b>
2.1 Data Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Sidoarjo..	38
2.2 Analisa Faktor Penyebab Kelalaian Pengemudi Dalam Ke	
celakaan Lalu Lintas Diwilayah Hukum Polres	
Sidoarjo.....	38
A) Mendahului Kendaraan Lain.....	40
B) Pengemudi Dalam Kondisi Kurang Fit Atau Mengantuk.....	40
C) Mengabaikan Lalu Lintas .....	41



## BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	59

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian Dari Polres Sidoarjo
- Lampiran 2. Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3. Jurnal Kecelakaan Lalu-Lintas
- Lampiran 4. Hasil Wawancara di Polres Sidoarjo
- Lampiran 5. Contoh Surat Penangkapan
- Lampiran 6. Petikan Putusan, Laka Lantas pengadilan Negeri Sidoarjo



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “ VETERAN”

JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Bayu Ari Kristianto  
NPM : 0871010006  
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 14 November 1989  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS LAKA LANTAS YANG  
MENIMBULKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI POLRES SIDOARJO

ABSTRAKSI

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian kecelakaan yang tak terduga tidak direncanakan dan diharapkan yang terjadi di jalan raya atau sebagai akibat dari kesalahan dari aktivitas manusia di jalan raya yang berakibat kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya dan bentuk pertanggungjawaban pidananya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang disebut hukum doctrinal dan perundang-undangan sebagai kaidah norma patokan perilaku manusia. Analisa data, menggunakan metode deskriptif analisis, artinya yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap fakta sosial sebagai kajian hukum empiris. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kecelakaan di wilayah hukum Sidoarjo, disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi kecelakaan tersebut mulai dari manusia itu sendiri, kendaraan, lingkungan tetapi yang paling dominan terjadi di wilayah hukum Sidoarjo adalah dari kelalaian manusia itu sendiri yang kurang berhati-hati dalam mengemudi yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Dan pertanggungjawaban pidana kasus kecelakaan lalu lintas diatur di dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009, tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, pasal 310 ayat 4, barang siapa dengan dengan kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Kata kunci : Faktor penyebab kecelakaan, pertanggungjawaban pidana  
kecelakaan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dewasa ini, dalam upaya menjamin terpeliharanya stabilitas nasional yang mantap guna mendukung pelaksanaan pembangunan, maka pemerintah telah melakukan berbagai upaya namun dalam kenyataannya masih saja terdapat tindakan dari anggota masyarakat yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi pola kehidupan mereka. Pada dasarnya manusia membutuhkan adanya keamanan (rasa aman) dan menghendaki suatu kehidupan yang nyaman. Salah satu contoh dari tindakan anggota masyarakat yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum adalah kelalaian yang berakibat timbulnya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, khususnya kendaraan bermotor. Permasalahan kasus kecelakaan ini didalam masyarakat sering terjadi, dikarenakan ketidak seriusan manusia dalam menanggapi suatu aturan jalan raya yang terkadang aturan tersebut diabaikan, tetapi menimbulkan banyak permasalahan pidana yang terkadang orang lain menjadi korban kecelakaan dalam kelalaian orang lain.

Ada beberapa perkembangan baru yang belum diakomodasikan oleh peraturan lalu lintas. Misalnya ragam tanda bahaya yang seharusnya sudah lebih banyak. Demikian pula yang berkenaan dengan ketentuan pengenaan seatbelt dan penyalaan lampu sepeda motor di siang hari. Meski ia sudah diakomodasikan melalui Peraturan Daerah (PERDA). Banyak ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat, di samping banyak pula ketentuan-

ketentuan hukum yang oleh karena kebiasaan, menjadi tidak dapat ditegakkan. Misalnya keharusan untuk memasang alat penerangan pada malam hari terhadap kendaraan bermesin atau tidak bermesin, nyaris tidak berlaku bagi becak dayung, becak barang dan sepeda. Penindakan terhadap mereka hampir tidak pernah dilakukan, atau kalau dilakukan menimbulkan reaksi yang kurang nyaman bagi para petugas sendiri. Reaksi sedemikian tidak timbul hanya dari pelaku pelanggaran, akan tetapi juga dari pihak warga masyarakat.<sup>1</sup>

Masyarakat mendakwah bahwa tindakan yang dilakukan oleh polisi dan pihak yang berwajib lainnya berlebihan, tentu segalanya ini berkaitan dengan manusianya. Dalam setiap kecelakaan lalu lintas, sedikit banyak unsur manusia berperan. Entah ia pelaku, entah pula korban dalam keadaan demikian tentu saja tidak dapat ditetapkan secara prioritas bahwa korban selalu berada di pihak yang benar. Termasuk pejalan kaki demikian pula dengan lawan korban, tidak pula boleh dianggap sebagai pihak yang selalu salah karena secara hukum ia menjadi tidak proporsional. Dalam kaitan dengan manusia ini, bahkan aparat penegak hukum di bidang lalu lintaspun dapat selalu dianggap benar. Empati masyarakat tertumpah kepada korban misalnya pengendara sepeda motor, sepeda atau bahkan pejalan kaki, apalagi manakala terjadi kecelakaan lalu lintas.

Pasal 16 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan diatur ketentuan mengenai rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan dan ruang kegiatan berskala provinsi.

Pasal 265 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur pemeriksaan

---

<sup>1</sup> Subanindyo Hadiliwuh, Undang-undang Lalu Lintas Sebagai Regulasi tertib Lantas Kota Medan, Jurnal Equality, Universitas Sumatera Utara, Vol. 11 No. 2 Agustus 2006. Hal .135

kendaraan bermotor secara terpadu, agar dapat dicapai daya guna dan hasil guna yang optimal. Penganturan dimaksud meliputi ketentuan mengenai ruang lingkup pemeriksaan, persyaratan pemeriksa, wewenang pemeriksa, dan pelaksanaan pemeriksa yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan pengaturan yang saling berkaitan. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia dan atau Petugas Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kewenangan oleh peraturan ini, pemeriksaan kendaraan bermotor dilanjutkan dengan penyelidikan dalam hal ditemukan terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini tidak mengurangi wewenang penyidik Polisi Negara Republik Indonesia atau penyidik sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan kebutuhan, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat pula dimanfaatkan oleh instansi lain dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah lainnya, yang pelaksanaan pemeriksaannya dilakukan oleh petugas pemeriksa dari instansi yang bersangkutan.

Data Laka Lantas Januari – Oktober 2011

Daerah	Meninggal Dunia	Luka berat	Luka ringan	jumlah
Krian	4	6	5	15
Tanggulangun	-	-	4	4
Porong	3	-	4	7
Taman	-	5	6	11
Jabon	1	-	7	8
Tulangan	-	-	5	5
Waru	1	-	3	4

Data Korban Kecelakaan Tabel 1.

Dari hasil penelitian mengungkap semua prosedur penanganan yang dilakukan oleh satuan laka lantas Polres Sidoarjo, butuh pemeriksaan untuk mencari keadilan siapa yang berhak dipidana dan siapa yang berhak untuk mendapat santunan ganti rugi atas kealpaan orang lain dalam melakukan perbuatan hukum, jadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat dipertanggungjawabkan si pembuatnya. Dan penyusun meneliti kasus yang ditangani Polres Sidoarjo sebanyak tabel yang diatas selama bulan Januari sampai Oktober 2011.

Salah satu kasus yang menarik perhatian, pada tahun 1940, di jembatan ciomas antara bandung dan Jakarta terjadi tabrakan antara sepeda motor dan orang yang berjalan di jembatan. Mengingat keadaan ketika itu, dimana lebar jembatan 4 meter, dan tak ada kendaraan lain, kecuali orang tadi yang berjalan disbelah kiri, sejurusan dengan sepeda motor ketika masuk jembatan tidak mengurangi kecepatannya (yang memang tak begitu cepat) dan tak memberi tanda klakson. Waktu sudah masuk jembatan tiba-tiba orang tadi memebelok ketengah, sehingga terjadilah tabrakan yang mengakibatkan matinya orang tadi. Pengendara sepeda motor dituntut dimuka karena matinya orang karena kealpaannya. Meskipun menentukan ada hubungan kausal antara perbuatan pengendara sepeda motor dan matinya orang yang ditabrak, tetapi karena terdakwa tidak ada kealpaan, maka dia dilepas dari tuntutan hukum. Dalam tingkat revisi tidak memandang terbukti, bahwa tabrakan yang berakibat mati itu adalah akibat dari dan mempunyai musabab pada perbuatan yang dituduhkan pada terdakwa sehingga musababnya dalam pemeriksaan tersebut tetap belum jelas. Oleh karena itu tentang kesalahan terdakwa tak perlu dipertimbangkan.

Prof. Moeljatno, menjelaskan dalam perkara tersebut bahwa musabab matinya orang tadi tetap belum jelas, adalah janggal sekali dan hanya dapat dimengerti kalau orang tak mengakui kemungkinan musababnya adalah lebih dari satu perbuatan kejadian. Dalam hal ini perbuatan orang itu sendiri dan pengendara sepeda motor. Orang yang meninggal tak dapat dituntut, sedangkan yang lain karena perbuatan yang dilakukan dalam keadaan itu sudah sepatutnya dan tidak melanggar aturan lalu lintas maka dia tak bersalah.<sup>2</sup>

Lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah perkotaan cenderung berkembang menjadi masalah yang memerlukan perhatian dan penanganan secara bersungguh-sungguh serta profesional agar akses negatif yang timbul dapat dikendalikan. Sistem lalu lintas dan angkutan jalan khususnya kendaraan bermotor di wilayah perkotaan cenderung dipandang sebagai biang keladi berbagai kemacetan dan kecelakaan yang melanda di hampir seluruh kota-kota di Indonesia.

Tingkat disiplin pemakai jalan saat berkendara masih belum memadai, tingkah laku sebagian pengemudi angkutan penumpang umum terutama bus masih sangat memperihatinkan, kebut-kebutan, saling mendahului, dan menaikkan serta menurunkan penumpang disembarang tempat di pertigaan, di tikungan dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus lalu lintas.<sup>3</sup>

Di sini citra aparat penegak hukum khususnya polantas (polisi lalu lintas), ditantang untuk merefleksikan suatu kondisi, bahwa penerapan sanksi yang tepat

---

<sup>2</sup> Moeljatno, Membangun Hukum Pidana., Bina Aksara, Jakarta, 1985, Cetakan I, hal, 16

<sup>3</sup> Wawancara Dengan Kanit Letda Eka Anggriana, Kanit Laka Lantas Polres Sidoarjo, 28 September 2011

bisa mendorong terciptanya disiplin dalam berlalu lintas. Apabila terjadi kecelakaan khususnya kendaraan bermotor dan kemudian terdapat korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut, maka pengemudi (pelaku tabrakan) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku.

Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa, barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan orang mati, dipidana dengan pidana selama-lamanya 5 Tahun, atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun. (UU. No.1/1960). Berdasarkan pasal ini yang dapat dituntut adalah seorang pengendara kendaraan bermotor yang menjalankan kendaraannya demikian cepat, kemudian menubruk seseorang hingga mati.

Pasal-pasal dalam KUHP tidak dirumuskan secara jelas mengenai pertanggung jawaban pengemudi, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut ilmu pengetahuan. Berdasarkan kenyataan tersebut sehingga mendorong penyusun untuk membuat suatu penulisan mengenai penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a) Faktor-faktor apa yang menyebabkan kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Sidoarjo ?
- b) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Sidoarjo?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk :

- a) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya.
- b) Menguraikan bentuk pertanggungjawaban pidana yang akan dijatuhkan kepada pengemudi yang menyebabkan orang lain meninggal dunia karena maraknya kecelakaan di jalan raya.

#### 1.4. Manfaat Yang Hendak dicapai dalam Penelitian Ini Adalah :

Dalam penelitian ini penyusun mencapai manfaat yang bersifat menyeluruh yaitu :

- a) .Untuk Kepentingan Ilmiah

Sebagai tolak ukur sejauh mana kegiatan penelitian ini dapat menunjang untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan maupun literatur ilmiah bagi yang berkepentingan, khususnya dalam lingkungan Universitas Pembangunan Nasional sendiri sebagai bahan acuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia.

- b) .Untuk Penulis

Memberikan tambahan ilmu pengetahuan dibidang hukum, serta menghindarkan permasalahan guna kelancaran arus lalu lintas, angkutan jalan khususnya kendaraan bermotor sehingga tidak terjadi kecelakaan yang fatal.

#### 1.5. Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pidana hanya menunjukan kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Sebab asas dalam prtanggungjawaban dalam hukum pidana. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder



schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga di indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van materiele feit* (*fait materielle*). Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya arrest susu dari HR 1969 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *overtrengingen*, berlaku asas tanpa kesalahan, tidak mungkin dipidana. Dalam buku-buku belanda yang pada umumnya tidak mengadakan pemisahan antara dilarangnya perbuatan dan dipidanya orang yang melakukan perbuatan tersebut (*strafbaar heid van het feit/strafbaarheid van de persoon*), dalam istilahnya *strafbaar feit*, hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan dinyatakan dengan hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijkheid* dan *ksalahan schuld*). Dikatakan bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wederrechtelijkheid*, tetapi sebaliknya *wederrechtelijkheid* mungkin ada tanpa adanya *ksalahan*. (Pompe hlm.88; Vos hlm 84).

Menurut Moeljatno orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana. Orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana, sekalipun banyak orang mengerti.

Dengan demikian ternyata, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana. Kecuali itu,

orang juga dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana, jika dia, meskipun tidak sengaja dilakukan, tetapi terjadinya perbuatan tersebut dimungkinkan karena dia alpa atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya dijalankan olehnya. Di sini celaan tidak berupa kenapa melakukan perbuatan padahal mengerti (mengetahui) sifat jeleknya perbuatan seperti dalam hal kesengajaan, tetapi berupa kenapa tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang seharusnya (sepatutnya) dilakukan olehnya dalam hal itu, sehingga karenanya masyarakat dirugikan. Di sini perbuatan dimungkinkan terjadi kealpaan. Selain dari dua hal di atas orang juga dapat melakukan perbuatan pidana padahal tidak mungkin dikatakan bahwa ada kesengajaan atau kealpaan, sehingga dia tidak dapat dicela apa-apa. Dalam konsep memandang bahwa asas kesalahan (asas culpabilitas) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Ditegaskan dalam konsep (pasal 35), bahwa, “asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat yang telah melakukan tindak pidana”. Walaupun prinsipnya bertolak dari “pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahan” (Liability based on fault), namun dalam hal-hal tertentu konsep juga memberikan kemungkinan adanya pertanggungjawaban yang ketat (“Strict liability”) dalam pasal 37, dan “pertanggungjawaban pengganti” (“Vicarious liability”) dalam pasal 36.

Kesalahan adalah keadaan psikis yang tertentu pada orang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan yang sedemikian rupa, hingga orang

itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Dan ucapan ini ternyata bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana.

a) Pertama : adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan

b) Kedua : adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celan tadi.

Di sini yang pertama-tama harus diajukan adalah bahwa di dalam kebanyakan KUHP negara-negara lain ada ditentukan bahwa terhadap anak di bawah umur yang tertentu, misalnya 10 tahun, tidak dapat diajukan tuntutan pidana. Maksudnya ialah, dengan demikian terhadap anak-anak di bawah 10 tahun dimungkinkan penuntutan, tidak supaya dipidana, tetapi diadakan tindakan. Akibat daripada perbaikannya adalah sebagai berikut:

Pertama: Dengan hilangnya batas umur tersebut, tidaklah berarti bahwa anak-anak dibawah umur tersebut, sekalipun belum dapat membedakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk harus dipadana. Sebab pada pertamanya pasal 37 (44 KUHP) juga berlaku bagi kanak-kanak, sehingga terhadap anak-anak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit harus dikecualian dan pertanggungjawab. Tetapi pasal tersebut tidak dapat digunakan atas dasar umur yang masih sangat muda saja.

Kedua: Terhadap anak-anak itu tentunya lebih cepat dianggap tidak ada kesengajaan/kealpaan daripada orang dewasa.

Ketiga: Kalau memang anak tersebut belum cukup mempunyai penginsafan tentang makna perbuatannya, maka atas dasar tidak dipidana jika

tidak ada kesalahan dia dapat dikecualikan. Jadi, tidak dapat dipidananya anak yang demikian itu tidak didasarkan atas suatu pasal dalam wet, melainkan atas hukum yang tidak tertulis.

Sebaliknya, kalau keadaan jiwanya tidak normal, fungsinya juga tidak baik, sehingga ukuran-ukuran yang berlaku dalam masyarakat tidak baik sesuai baginya. Bagi mereka tidak ada guna diadakan pertanggungjawaban. Mereka harus dirawat atau dididik dengan cara yang tepat. Bahwa mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya, atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”<sup>4</sup>

#### 1.6. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum belanda yaitu strafbaarfeit. Ada pula yang mengistilahkan menjadi delict yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara Anglo Saxon memakai istilah offense atau criminal act.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup> Larangan tersebut ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu. Moeljatno memisahkan antara criminal act dan criminal responsibility yang menjadi unsur tindak pidana. Menurut

---

<sup>4</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana.. Renika Cipta.Cetakan 8. Jakarta ,2009, hal.165

<sup>5</sup> Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 59

moeljatno hanya lah unsur – unsur yang melekat pada criminal act (perbuatan yang dapat dipidana). Sedangkan yang termasuk unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang bersifat melawan hukum.

Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dinyatakan setiap orang yang disangka, ditangkap, dan ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib di anggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>6</sup>

Telah dikemukakan bahwa pembedaan adalah suatu upaya terakhir. Kita akan membatasi penggunaan pidana dalam batas-batasnya dan juga harus diusahakan untuk terlebih dahulu menerapkan sanksi-sanksi lain yang tidak bersifat pidana. Pembedaan seyogyanya diadakan hanya bilamana norma bersangkutan begitu penting bagi kehidupan dan kemerdekaan anggota masyarakat lainnya atau bagi berfungsi secara wajar kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>7</sup>

## 1.8. Kesengajaan Dan Kealpaan

### 1.8.1. Kesengajaan

Tentang apakah arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP. Lain halnya dengan KUHP Swiss dimana dalam pasal 18 dengan tegas ditentukan, barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu

---

<sup>6</sup> Abdoel Djamali, Pengantar hukum Indonesia, Raja Grafindo persada, Edisi Revisi, Jakarta, 2008. Hal, 200

<sup>7</sup> Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Cetakan I, Jakarta, 1987, Hal, 4

dengan sengaja.

Definisi seperti ini, dalam Memorie Van Toelicting Swb. Ada pula, “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”

Soalnya sekarang ialah, apakah arti dikehendaki dan diketahui itu dalam teori tentang hal ini ada dua aliran, yaitu :

- a). Teori kehendak (Wilstheorie) yaitu yang paling tua dan pada masa timbulnya teori yang lain mendapat pembelaan kuat dari Von Hippel guru besar di Gottingen, Jerman. Di negeri Belanda antara lain dianut oleh Simons.
- b). Teori pengetahuan (Voorstellingstheorie) yang kira-kira tahun 1910 diajarkan oleh Frank, guru besar di Tubingen, Jerman, dan mendapat sokongan kuat dari Von listis. Di Nederland penganutnya antara lain adalah Von Hamel

Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan.<sup>8</sup>

#### 1.8.2. Kealpaan

Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaannya. Ini di samping pasal 338 KUHP dengan sengaja

---

<sup>8</sup> Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Renika Cipta. Cetakan ke5. Jakarta, 1993. hal.171

menyebabkan matinya orang lain.

Mengenai kealpaan ini keterangan resmi dari pihak pembentuk W.v.S. (Smidt I-825) adalah sebagai berikut :

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan wet mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam oleh pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar bahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Di sini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mngindahkan larangan itu.<sup>9</sup>

#### 1.9. Unsur Kelalaian Yang Menimbulkan Kecelakaan

Untuk melihat apakah seseorang dapat dipertanggung jawabkan dimuka persidangan maka harus ditentukan apakah pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan sengaja (dolus) atau kelalaian/ kealpaan (culpa).

Dalam lapangan hukum pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan opzet merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan opzettelijk, maka

---

<sup>9</sup> Ibid. hal.198

unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan di belakangnya dan harus dibuktikan.

Sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksud disini adalah seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat

Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.

Jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan kepada si pelaku seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut.

Disamping unsur kesengajaan di atas ada pula disebut sebagai unsur



kelalaian atau kealpaan atau culpa yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau onbewuste schuld dan kealpaan disadari atau bewuste schuld. Dimana dalam unsur ini factor terpentingnya adalah pelaku dalam menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati

Wilayah culpa ini terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali.

Dalam culpa atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh Undang-undang

Maka dari uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada

si pelaku atas perbuatan pidananya itu.<sup>10</sup>

#### 1.10. factor-faktor penyebab kecelakaan

##### 1.10.1 human eror (kesalahan pada manusia itu sendiri)

- a. Dalam kondisi mengantuk, seorang pengendara masih mengemudikan kendaraannya tanpa menghiraukan bahaya yang akan terjadi.
- b. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah tersedia di jalan guna mengatur stabilitas arus perjalanan kendaraan, dan untuk mengurangi faktor terjadinya kecelakaan.
- c. Tidak memberi kesempatan kepada pejalan kaki yang mau menyebrang jalan.
- d. pengurusan SIM yang melewati calo tanpa melalui prosedur yang ada.

##### 1.10.2. kendaraan

- a. kondisi fisik dari kendaraan yang kurang memadai untuk dikendarai dari hal ban yang gundul sehingga mengakibatkan selip
- b. Proses pengereman pada kendaraan tersebut tidak berfungsi secara optimal.
- c. Mesin yang tidak selalu dirawat sehingga menimbulkan mesin mati tiba-tiba atau mogok.

##### 1.10.3. Lingkungan

- a. banyak jalan yang berlubang dan bergelombang dan tidak segera diperbaiki.

---

<sup>10</sup> [http://Hukum.Kompasiana.com/2012/05/05/Kecelakaan.Saiful Jamil Dilihat Dari Kesalahan Dan Pertanggung Jawaban Hukum](http://Hukum.Kompasiana.com/2012/05/05/Kecelakaan.Saiful%20Jamil%20Dilihat%20Dari%20Kesalahan%20Dan%20Pertanggung%20Jawaban%20Hukum)

- b. Warna marka jalan yang sudah memudar, sehingga membuat para pengendara kendaraan kurang fokus dalam mematuhi aturan lalu lintas.
- c. Jalan basa atau kondisi hujan yang menyebabkan jalan menjadi licin .<sup>11</sup>

## 1.11. Disiplin Berlalu Lintas

### 1.11.1. Disiplin Berlalu Lintas

Disiplin berlalu lintas merupakan salah satu pencerminan dari disiplin nasional yang menunjukkan martabat dan harga diri bangsa. Maka dari itu pemerintah seharusnya lebih mengutamakan aspek pendidikan kepada masyarakat berkaitan dengan disiplin lalu lintas tidak hanya diajarkan dalam bentuk ekstrakurikuler selama ini tetapi harus lebih mendasar melalui intrakurikuler dan dikenalkan mulai tingkat pendidikan TK sampai dengan SMA yang sifatnya diintegrasikan melalui mata pelajaran tertentu.

Pengintegrasian pendidikan lalu lintas tidak dimaksudkan untuk penambahan mata pelajaran baru, namun dilakukan dengan memasukkan pokok-pokok bahasan tentang disiplin lalu lintas dalam salah satu mata pelajaran, strategi pengintegrasian pendidikan lalu lintas dilakukan melalui telaah standar kompetensi, kompetensi dasar yang mengandung etika dan kedisiplinan.

Dengan adanya model pengintegrasian pendidikan keselamatan lalu lintas ini dapat memperoleh pemahaman dalam :

---

<sup>11</sup> Wawancara Dengan Letda Eka Anggriana, Kanit Laka Lantas Polres Sidoarjo, Rabu 28 September 2011

- a. Menganalisa susbtansi dan hubungan pendidikan lalu lintas dengan standart
- b. Mengintegrasikan indikator pendidikan lalu lintas ke dalam standart kompetensi dan kopetensi dasar
- c. Menyusun model integrasi pendidikan lalu lintas dalam silabus pembelajaran
- d. Menyusun model integrasi pendidikan lalu lintas kedalam rencana pelaksanaan pembelajaran

Manfaat lainnya dengan adanya model ini, dapat menjadi pedoman bagi guru dalam pembangunan sekolah dalam lingkungan berlalu lintas dengan mengembangkan kebiasaan disiplin berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan mutu penyelenggara pendidikan di sekolah melalui pendidikan lalu lintas yang diintegrasikan secara sitematis dalam mata pendidikan.<sup>12</sup>

ruang linkup materi pendidikan lalu lintas :

- a. Pengertian lalu lintas
- b. Pengertian rambu-rambu lalu lintas
- c. Pengertian marka jalan
- d. Pengertian alat pemberi isyarat pengatur lalu lintas
- e. Pengertian pengamanan diri sebagai pemakai jalan
- f. Pengertian tata cara berlalu lintas yang benar

---

<sup>12</sup> Rahadi B. Prijatno. Disiplin Berlalu Lintas. WWW. Google Com, Diakses Pada Hari jumat Tanggal 25 Mei 2012, Jam 19.32.

### 1.11.2. Persyaratan Pengemudi

Setiap pengemudi kendaraan bermotor, wajib memiliki surat izin mengemudi. pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan, surat izin mengemudi diberikan kepada orang yang namanya tertera didalamnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan tanda bukti kecakapan dan keabsahan, pengemudi untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan dapat pula digunakan sebagai identitas pengemudi.

Termasuk dalam pengertian pengemudi adalah orang yang langsung mengawasi orang lain mengemudikan kendaraan misalnya seorang instruktur pada sekolah pengemudi yang berada disamping calon pengemudi pada waktu praktek mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.<sup>13</sup>

Pasal 57 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor di jalan, wajib :

- 1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor.
- 2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia.
- 3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kendaraan beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas :
  - A. Sabuk keselamatan.
  - B. Ban cadangan.

---

<sup>13</sup> C.S.T. Kansil Dan Christine Kansil. Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya. Jakarta. Rineka Cipta. 1995. Cet Pertama. Hal 33

- C. Segitiga pengaman.
  - D. Dongkrak.
  - E. Pembuka roda.
  - F. Helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah.
  - G. Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### 1.11.3. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, peralatan teknik dalam ketentuan ini dapat berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata berada dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai fungsinya, termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.

#### 1.11.4. Jenis Kendaraan

Kendaraan dibedakan menjadi dua bagian yaitu kendaraan pribadi dan umum. Kendaraan pribadi dipergunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ada unsur campur tangan orang lain, sedangkan kendaraan umum adalah

kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Termasuk dalam pengertian kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disewakan kepada orang lain baik dengan maupun tanpa pengemudi selama jangka waktu tertentu.

Sedangkan kendaraan bermotor roda dua tidak termasuk dalam pengertian kendaraan umum. Mobil untuk sekolah mengemudi termasuk juga dalam pengertian kendaraan umum, karena dalam biaya belajar telah termasuk sewa untuk memakai kendaraan tersebut pada waktu digunakan untuk belajar.<sup>14</sup>

#### 1.12. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan dikelompokkan menjadi 3 bentuk kecelakaan yaitu :

- 1) Kecelakaan akibat kerja pada perusahaan
- 2) Kecelakaan lalu lintas
- 3) Kecelakaan di rumah

Pengelompokan 3 bentuk kecelakaan ini merupakan pernyataan yang jelas, bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan bagian dari kecelakaan kerja, sedangkan definisi yang pasti dari kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian kecelakaan yang tidak terduga, tidak direncanakan dan diharapkan yang terjadi di jalan raya atau sebagai akibat dari kesalahan dari suatu aktivitas manusia di jalan raya yang mana mengakibatkan luka, sakit kerugian baik pada manusia barang maupun lingkungan.

Sedangkan korban kecelakaan lalu lintas adalah manusia yang menjadi korban akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, berdasarkan

---

<sup>14</sup> Ibid. Hal.12

tingkah keparahan korban kecelakaan dibedakan menjadi 3 macam yaitu :

- 1) Korban meninggal dunia atau mati
- 2) Korban luka berat
- 3) Korban luka ringan

Klasifikasi kecelakaan pada dasarnya dibuat berdasarkan tingkat keparahan korban, dengan demikian kecelakaan lalu lintas dibagi dalam 4 macam kelas sebagai berikut :

- 1) Klasifikasi berat

Apabila terdapat korban yang mati (meskipun hanya satu orang) dengan atau korban luka-luka berat atau ringan.

- 2) Klasifikasi sedang

Apabila tidak terdapat korban yang mati namun dijumpai sekurang-kurangnya satu orang mengalami luka-luka berat.

- 3) Klasifikasi ringan

Apabila tidak terdapat korban mati dan luka luka berat dan hanya dijumpai korban yang luka ringan saja.

- 4) Klasifikasi lain-lain

Apabila tidak ada manusia yang menjadi korban hanya berupa kerugian materiil saja baik berupa kerusakan kendaraan, atau fasilitas lain<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>. Pengertian Dan Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas. WWW. Google Com, Diakses Pada Hari jumat Tanggal 01 Juni 2012, Jam 01.21.



### 1.13. Pertanggungjawaban Pengemudi

Dalam mengendarai kendaraan pengemudi sudah langsung mempunyai tanggungjawab atas kesadaran yang dikemudikannya tersebut. Karena dalam Undang-undang Lalu Lintas angkutan jalan ketentuan pasal 1 menjelaskan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), dengan adanya SIM ini membuktikan bahwa pengemudi sangat besar tanggungjawabnya dalam berkendara, dan semua ketentuan pertanggungjawaban pengemudi diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut :

#### √ Pasal 310

- 1). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- 4). Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

#### ✓ Pasal 311

- 1). Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 2). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud pasal 229 ayat (2) pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- 3). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- 4). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- 5). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

#### ✓ Pasal 312

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraanya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 321 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

#### 1.14. Metode Penelitian

Sebelum menguraikan pengertian metode penelitian hukum, terlebih dahulu penyusun mengemukakan bahwa metodologi dapat diartikan juga sebagai logika dari arti penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Secara etimologis metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan suatu pengertian ini diambil dari istilah metode yang berasal dari bahasa Yunani, “Methodos” yang artinya “jalan menuju.”<sup>16</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang disebut

---

<sup>16</sup> Bahder J. Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, Cet Ke 1, h 13

juga penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Data dalam penelitian dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Tujuan dalam sebuah penelitian hanya memerlukan satu tujuan umum, ada juga yang mempunyai beberapa tujuan yang sesuai dengan permasalahan atau sub permasalahan. Tujuan penelitian ini harus dinyatakan dengan terang dan jelas akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.

Penelitian merupakan pencerminan secara konkrit kegiatan ilmu dalam memproses ilmu pengetahuan. Metode penelitian pada hakekatnya merupakan operasionalisasi dari metode keilmuan. Dengan demikian, maka penguasaan metode ilmiah merupakan persyaratan untuk dapat memahami jalan pikiran yang terdapat dalam langkah-langkah penelitian.

Secara operasional penelitian dapat berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menunjang pembangunan, pengembangan sistem dan mengembangkan kualitas manusia. Keempat fungsi tersebut pada dasarnya berkaitan secara integratif.

Kegunaan dalam sebuah penelitian adalah suatu bentuk yang diupayakan dan akan dihasilkan dalam penelitian serta apa manfaat penelitian tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau praktik hukum.

#### 1.15. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu,

keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Penelitian ini, ini kadang kadang berawal dari hipotesis, tetapi dapat juga tidak bertolak dari hipotesis, dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada, dan dapat menggunakan data kualitatif atau kuantitatif. Termasuk dalam penelitian deskriptif adalah survey deskriptif.

Pendekatan yang penyusun lakukan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah pertanggung jawaban pidana kasus kecelakaan lalu lintas bila ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban.<sup>17</sup>

#### 1.16. Sumber Data

Karena penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum data sekunder, maka data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dapat berupa sebagai berikut :

##### A. Bahan hukum primer

Konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kecelakaan Lalu Lintas Di

Jalan Raya yang mengatur tentang tindak pidana yang tercantum di dalam :

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1989. Hal. 25

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Disiplin berlalu lintas di jalan raya
- c. KUHP

#### B. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum. Bahan hukum sekunder ini sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian para pakar dan jurnal hukum.

#### C. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 1.17. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan wawancara, adapun maksudnya adalah sebagai berikut :

#### 1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberi informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dalam penelitian ilmu hukum, penyeleksian terhadap kepustakaan yang

digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku ilmu hukum, akan tetapi meliputi aturan perundang-undangan dan dokumen, baik dokumen resmi atau tidak maupun berupa catatan.

Dalam hal ini penyusun akan menganalisa perbandingan pelaksanaan yang diperoleh dari mengumpulkan literatur hukum, internet, KUHP, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan angkutan Jalan.

## 2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

Dalam prakteknya nanti penyusun akan melakukan wawancara langsung dengan Kanit Laka Lantas, untuk memperoleh keterangan mengenai pertanggung jawaban pidana kasus kecelakaaa lalu lintas, bila ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan upaya hukum yang dapat dilakukan bagi para korban.

### 1.18. Metode analisis data

Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis, artinya data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap fakta sosial sebagai kajian hukum empiris. Dalam artian menggambarkan suatu gejala di masyarakat melalui pengamatan yang dilalui oleh penyusun untuk menentukan isi dan makna aturan hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan bahan hukum yang menjadi objek kajian.

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Lokasi yang dipilih sebagai penelitian adalah Polres Sidoarjo, yang mana data keseluruhan kecelakaan ada di tempat ini.

#### 1.19. Sistematika Penulisan Hukum

Penyusun dalam menyusun penulisan hukum ini, berpedoman pada suatu sistematika yang baku. Sistematika memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar penulisan hukum agar memudahkan dalam mempelajari isinya. Penulisan skripsi terbagi menjadi tiga sub bab yang saling berhubungan. Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang masing-masing merupakan pembahasan dari bab yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan. Di dalamnya terdiri dari empat sub bab yaitu sub bab pertama menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian sub bab kedua menguraikan tentang perumusan masalah. Selanjutnya di sub bab ketiga disajikan tujuan dan sub bab keempat mengenai manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini.

Bab II, mengenai faktor-faktor kelalaian pengemudi yang bisa dipidana. pertama yang mengenai data kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Hukum Sidoarjo . Ke dua tentang analisa faktor penyebab kelalaian pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah Hukum Polres Sidoarjo. Ke tiga Analisis kasus kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Ke empat analisa unsur-unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas



Bab III, merupakan proses penanganan kasus laka lintas di Polres Sidoarjo.  
Kedua bentuk pertanggungjawaban pidana kasus laka lintas. Ke tiga analisa  
pertanggungjawaban pidana kasus laka lintas.